

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ke-45 pada November 2016, yang dimenangkan karena keunggulannya melalui *Electoral Vote* (BBC News Indonesia, 2016). Sebelum menjadi presiden, Donald Trump merupakan seorang miliarder pengusaha real estat di New York yang juga seorang bintang aktif di TV semenjak tahun 1940-an (History.com Editor, 2016). Namun, ketertarikan Trump untuk mencalonkan diri sebagai presiden telah muncul dari tahun 1980-an hingga tahun 2000-an, yang pada akhirnya Trump secara resmi mengumumkan pencalonan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat pada Juni 2015. Dengan slogan “Make America Great Again”, Trump memulai kampanye kontroversialnya dengan mengangkat isu tentang imigrasi ilegal, masalah pajak, negosiasi perjajian dagang, sebagai upaya memperkuat Amerika dan ekonominya (BBC News, 2017). Semenjak kampanyenya Trump telah menunjukkan fokusnya terhadap isu imigrasi, dengan memaparkan banyak gagasan sebagai upaya dalam pengurangan imigran tidak berdokumen. Namun, terdapat salah satu kampanye yang sangat kontroversial yaitu keinginannya untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko untuk mengurangi persoalan imigrasi di AS yang mana berbagai tindakan yang dilakukannya bertolak belakang dengan sejarah AS hingga maupun sikap yang telah ditunjukkan AS dalam dua dekade terakhir.

Jika melihat latar belakang Amerika Serikat, negara ini telah lama dikenal sebagai negara imigran, dimana AS telah lama menjadi tujuan migrasi para imigran dari berbagai wilayah dunia dan memiliki kecenderungan terbuka terhadap imigran. Pada sensus data tahun 1850 tercatat sekitar 2,2 juta imigran turut menyumbang 10% dari jumlah total populasi AS saat itu (Zong, Batalova, & Burrows, 2020), yang terus berkembang menjadi lebih dari 13,5 juta pada akhir abad 19 (Kopf, 2019).

Perkembangan imigran pun terus berlanjut hingga saat ini, dimana pada tahun 2018 terhitung 44,7 juta imigran yang menetap di Amerika Serikat, yang membuat AS memiliki jumlah presentase imigran lebih banyak daripada negara lainnya. Dirujuk melalui data yang terkumpul, diperkirakan setidaknya terdapat 10,7 juta imigran yang ilegal (tidak berdokumen) yang setara dengan 3% dari jumlah penduduk AS atau sekitar 25% dari jumlah imigran di AS (Amadeo, 2019). Sebagian besar kelompok imigran yang memasuki Amerika Serikat ini memiliki pendidikan yang rendah, tidak dapat berbicara bahasa Inggris, tidak terampil, memiliki tradisi serta kepercayaan yang berbeda dari penduduk AS, atau bahkan sedang bersembunyi atau melarikan diri dari situasi yang berbahaya secara politik, ekonomi, maupun sosial dari tempat asal mereka (Kopf, 2019).

Populasi imigran di AS berawal dengan imigran dari Inggris dan Eropa yang menjadi mayoritas di era kolonial, yang kemudian masuk imigran kulit gelap, diikuti imigran dari negara-negara Eropa yang semakin berkembang, hingga tergeser oleh imigran Cina yang berdatangan hingga menjadi mendominasi populasi migran. Perkembangan imigran tersebut seringkali berdampak pada arah kebijakan AS, seperti sistem kontrol imigrasi hingga kebijakan yang membatasi jumlah imigran dari negara tertentu untuk membatasi pertumbuhan jumlah mereka di AS. Dengan munculnya industri-industri baru di Amerika, menarik banyak tenaga kerja di berbagai sektor yang membuat tren imigran pun bergeser imigran asal Meksiko yang perlahan masuk, yang kemudian diikuti dengan Revolusi Meksiko pada 1990-1920 yang menyebabkan aliran imigran Meksiko semakin meningkat di AS, dengan alasan keamanan dan melarikan diri dari kekerasan yang terjadi di negaranya. Mengingat dekatnya jarak antara Meksiko dan AS, sangat masuk akal apabila imigran Meksiko ini menjadikan AS tujuan utama mereka dalam memperbaiki nasib, juga mengingat lapangan kerja kurangnya upah yang memadai di Meksiko mengakibatkan peningkatan tajam pada pertumbuhan mereka di AS (Congress, 2015). Situasi seperti ini mendorong pemerintah

merespon dengan membuat kebijakan imigrasi sekaligus sebagai upaya melaraskan hubungan AS-Meksiko, yang menunjukkan sikap *love-hate relationship* antar kedua negara tersebut. Selain isu imigran, hubungan AS-Meksiko seringkali dipengaruhi beberapa isu lain seperti pengalaman traumatis Meksiko atas intervensi AS, kesenjangan ekonomi, perbedaan karakter dan budaya, serta hubungan yang saling bergantung antar dua negara tersebut dalam isu politik, ekonomi, sosial dan keamanan hingga saat ini (U.S. Library of Congress, n.d.).

Dalam perjalanan panjang imigrasi dan berbagai situasi yang mempengaruhi arah kebijakan imigrasi AS, tragedi serangan teroris 9/11 di tahun 2001 menjadi salah satu pemicu besar dalam pengetatan penegakan hukum imigrasi AS di modern ini. Pemerintahan Bush yang saat itu menjabat, membuat fokus kebijakan luar negeri mereka bergeser untuk memperketat keamanan dalam negaranya dari warga asing. Bush mengesahkan *Homeland Security Act*, yang dibuat sebagai dasar hukum untuk menjaga keamanan AS atas potensi serangan teroris di masa depan, dan juga membentuk *Department of Homeland Security* (DHS), sebagai lembaga yang turut mengawasi berbagai keamanan negara, termasuk yang berurusan dengan imigrasi (AHIMA, 2010). UU ini juga menjelaskan ditingkatkannya petugas imigrasi dan pendeportasian; membentuk program *Secure Communities* guna memberlakukan kerjasama negara federal dan lokal dalam penegakan aturan imigrasi (Hesson., 2012); serta kebijakan *Secure Fence Act* atau dibangunnya pagar pembatas untuk mencegah ancaman yang datang dari perbatasan AS (The White House, 2006).

Di era Obama, peningkatan keamanan perbatasan tetap dilanjutkan, namun Obama mengganti program *Secure Communities* Bush dengan *Priority Enforcement Program* (PEP) dimana pendeportasian imigran ilegal lebih difokuskan ke imigran yang memiliki catatan kriminal; serta membuat program *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA) untuk perlindungan anak imigran serta imigran tertentu (Crimmigration, 2015). Walaupun keduanya memiliki tujuan

yang berbeda, Bush dan Obama sama-sama berupaya dalam menyeimbangkan antara kebutuhan akan penegakan imigrasi yang lebih ditingkatkan dan kebijaksanaan melindungi hak-hak imigran di AS. Peningkatan keamanan tersebut sendiri dianggap beralasan khusus akibat adanya meningkatnya imigran besar di tahun sebelum Bush menjabat diikuti rasa waspada karena tindakan terorisme yang menyebabkan perhatian khusus terhadap warga asing, yang terus menerun hingga era Obama. Sementara sikap yang ditunjukkan oleh kedua presiden tersebut terhadap Meksiko tetap baik dalam menjaga hubungan diplomatik AS-Meksiko, yang mana Presiden Bush menganggap imigran Meksiko seperti pendahulunya, sementara Obama menyatakan bahwa orang Meksiko merupakan bagian dari kehidupan Amerika. Hal ini sangat kontras dengan perspektif Trump dalam melihat imigran Meksiko, dimana ia berulang kali memberi label bahwa imigran Meksiko merupakan penjahat, teroris bahkan pemerkosa, yang bertujuan mengeksploitasi UU Imigrasi Amerika Serikat (Nakamura, 2019).

Dalam menegakkan imigrasi, Trump melakukan berbagai upaya yang terwujud pada kebijakan melalui Perintah Eksekutifnya. Banyak kebijakan Trump yang dianggap kontroversial pada rangkaian Perintah Eksekutif tersebut, namun gagasannya mengenai tembok perbatasannya yang membawa isu strategis sangat menonjol hingga menuai banyak kontra yang menarik perhatian khusus untuk diteliti. Pasalnya sedari awal kampanye, Donald Trump telah menunjukkan ambisinya dalam tuntutan untuk membangun tembok perbatasan dengan mengangkat isu imigrasi dan para imigran latin yang mayoritas berasal dari Meksiko. Hingga terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ia terus bersikeras bahwa ia akan memenuhi janji tersebut melalui kebijakan yang dikeluarkan melalui Perintah Eksekutif terkait peningkatan keamanan perbatasan. Namun yang menarik ialah bagaimana ia kurang konsisten dalam menjelaskan mengapa AS membutuhkan tembok pembatas seperti yang direncanakannya (Morin, 2019). Pasalnya, rencana Donald Trump untuk

membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko bukanlah berasal dari analisis keamanan yang bertahun-tahun telah diamati melalui studi atau bukti bahwa tembok akan mengurangi imigrasi ilegal serta obat-obatan terlarang (Anderson, 2019). Para analis dan akademisi pun tidak menemukan ancaman signifikan terhadap imigrasi ketika mereka mengeksplorasi peran indikator lingkungan yang ditinggali oleh para imigran (Newman, Shah, & Collingwood, 2018). Pun tidak terdapat kejadian signifikan pada perpolitikan internasional yang dapat mendorong adanya kebijakan tembok perbatasan Trump ini.

Pada pidato-pidatonya Trump tampak mengeluarkan argumen-argumen yang mengarah pada klaim bahwa imigran seolah menjadi representasi buruk dari masyarakat. Trump men-generalisasi bahwa kriminal dan imigran adalah sama, serta dampak-dampak buruk dari imigran yang dapat mempengaruhi serta mengancam rakyat AS (Mora, 2019). Trump memetakkan terhadap publik bahwa imigran merupakan ancaman besar bagi ekonomi maupun keamanan nasional AS (Pierce & Selee, 2017). Seringkali Trump pun memanfaatkan kesalahan-kesalahan minor yang dilakukan imigran untuk menjustifikasi alasannya untuk membangun tembok perbatasan, yang seringkali tidak dianalisis berlandaskan dengan fakta yang ada. Tak hanya itu dalam pembangunan temboknya pun Trump berjanji untuk membuat Meksiko membayar tembok perbatasan tersebut dengan mengancam akan menyita transfer uang imigran melewati *Western Union* yang dikirimkan ke Meksiko. Namun, seiring berjalannya waktu Trump nampak mundur dalam pemenuhan janji tersebut, terlebih Meksiko yang telah menyatakan tidak akan membayar tembok tersebut (Silva, 2020).

Sejak dilantikannya Trump sebagai presiden AS, ambisi Trump nampak dari upayanya dalam mencari pendanaan untuk tembok perbatasannya yang menunjukkan seolah tembok perbatasan ini merupakan kebijakan yang diprioritaskan oleh Trump dibanding kebijakan lainnya. Seperti pada awal Trump menjabat ia telah mengancam untuk memveto tagihan anggaran

apa pun jika setidaknya terdapat alokasi dana sebesar \$ 5,7 miliar pada pendanaan tembok, yang mengakibatkan sembilan departemen pemerintah federal ditutup selama 35 hari (Chamberlain, 2019). Lalu, Trump juga memanfaatkan ancamannya dengan mengumumkan keadaan darurat nasional agar dana sejumlah \$ 3,6 miliar yang dijadwalkan untuk proyek-proyek konstruksi militer masuk ke dana pembangunan tembok, yang ketika keadaan darurat nasionalnya ditolak dengan resolusi DPR, Trump pun menggunakan hak veto pertamanya dengan menyatakan bahwa resolusi tersebut merupakan “suara yang menentang kenyataan” (Biography, 2020). Terlebih Trump yang berencana untuk mengalihkan \$ 7,2 miliar atau lebih agar total dana untuk membangun temboknya bertambah menjadi \$ 18,4 miliar atau bahkan lebih pada Januari 2020, yang menyebabkan beberapa proyek dan perencanaan pembangunan federal seperti perbaikan jalan dan fasilitas perawatan untuk anak-anak prajurit mengalami penundaan bahkan pembatalan (Ceney-Rice, 2020). Tak hanya itu, pengeluaran dana tembok perbatasan pun dapat melebihi perkiraan, ditambah lagi dana yang harus dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan tembok (American Immigration Council, 2019).

Kebijakan-kebijakan terkait perbatasan yang telah dibuat dibawah kepemimpinan Trump, terutama pada kebijakan tembok perbatasannya tentu mengundang tentangan dari banyak pihak. Terdapat beberapa argumen yang diantaranya: pertama, angka imigrasi berhasil tidak mengalami kenaikan pada dua dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa banyak imigran Meksiko yang meninggalkan AS tiap tahunnya, yang berarti bahwa lebih banyak kuota imigran Meksiko yang pergi dibanding imigran Meksiko yang masuk untuk pindah ke AS yang menunjukkan bahwa tren migrasi masuk ke AS telah berakhir. Kedua, banyak penelitian, termasuk penelitian dari Kantor Anggaran Kongres, menunjukkan bahwa imigran memberikan keuntungan ekonomi bersih secara keseluruhan terhadap negara. Penelitian juga menunjukkan bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh para imigran bahkan yang tak

resmi sekalipun, dan investasi atas pembentukan kelompok kewirausahaan paling signifikan ditemui di negara yang dibentuk oleh imigran generasi kedua. Hal lain mengenai program bantuan publik, imigran disini memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mendaftarkan diri dalam program pemerintah tersebut dibanding dengan penduduk asli AS. Selanjutnya yaitu keinginan imigran untuk terus berintegrasi, dimana sejauh ini banyak pernyataan dari Trump yang mengucapkan bahwa Meksiko turut menjadi ancaman budaya bagi AS yang faktanya pernyataan itu tidak terlalu akurat. Sebagian besar imigran terutama keturunan mereka atau anak-anak mereka justru mempelajari bahasa Inggris dan sebagian besar dari para imigran pun juga religius (Mora, 2019). Lalu, banyak pihak dari Konstitusi, partai oposisi bahkan dari partai Republikan pun menganggap tembok perbatasan ini sangat menghabiskan banyak biaya, dan tidak efektif dalam menanggulangi imigran gelap maupun obat-obatan terlarang.

Terdapat juga respon dari berbagai pihak seperti *Non-Governmental Organisation*, *American Civil Liberties Union* (ACLU) dan *Human Rights First* menunjukkan kebingungan atas tindakan AS dibawah pemerintahan Donald Trump yang sebelumnya belum pernah terjadi dengan pertimbangan tantangan hukum, karena tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap konvensi internasional mengenai perlindungan migran. Banyak dari kelompok masyarakat juga menunjukkan protes seperti pekerja/sukarelawan untuk kemanusiaan juga memperlihatkan tentangan mereka terhadap rencana pembangunan tembok Trump dengan banyaknya petisi-petisi yang dibuat agar publik turut serta menandatangani dan mendukung bantuan kemanusiaan. Perlawanan dari penduduk asli Amerika terhadap tembok perbatasan pun juga terjadi yang ditunjukkan melalui sebuah kamp di Lembah Rio Grande, yang didirikan oleh anggota Suku Carrizo / Comecrudo Texas. Bernamakan Gerakan Rio Bravo aksi yang dilakukan oleh terutama penduduk asli, dan kulit berwarna di lokasi pembangunan tembok yang direncanakan di saluran Morillo di Suaka Margasatwa Nasional Rio Grande. Selain itu, Pusat

Keragaman Hayati yang berbasis di Tucson juga turut bergabung dengan para aktivis di El Paso, termasuk *Border Network for Human Rights*, dalam memprotes tembok perbatasan yang sedang dibangun di sana. Juga gerakan anak muda yang berdedikasi tinggi untuk tanah, hak, serta masa depan bangsa yaitu *Tohono O'odham Hemajkam Rights Network* (TOHRN) yang pada gerakan ini mereka telah mendokumentasikan pelanggaran patroli perbatasan yang terjadi di tanah Tohono O'odham selama beberapa tahun, dan mengambil sikap terhadap tembok perbatasan ini (Robert, 2019). Dari Partai Republikan pun menunjukkan banyak ketidaksetujuan, yang salah satunya mereka berfikir bahwa pembangunan tembok ini merupakan solusi yang tidak efektif dan menghabiskan banyak biaya untuk mengamankan perbatasan. Dalam pendanaan tembok perbatasan, Trump dan partainya sendiri mengalami perbedaan pendapat, yang mana Partai Republikan berusaha untuk meyakinkan Konstituen untuk tetap mempertahankan dana yang ingin dialihkan oleh Trump untuk tembok perbatasannya (Mitchell & Carney, 2019).

Meskipun menghadapi berbagai kendala, kecaman dan penolakan dari berbagai pihak seperti dalam staf pemerintahannya sendiri, partasi oposisi, Kongres dalam menyediakan dana, masyarakat pro-imigran, media, organisasi internasional dengan menyatakan ketidaksetujuan mereka akan pembangunan tembok, namun Trump tetap bertekad untuk melanjutkan rencananya dalam rencananya tersebut. Terlebih alasan Trump dalam menjelaskan keperluan dibangunnya tembok yang tidak konsisten dan tampak samar meninggalkan pertanyaan besar dibalik ambisinya dalam kebijakan pembangunan temboknya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis menemukan suatu pokok permasalahan yaitu:

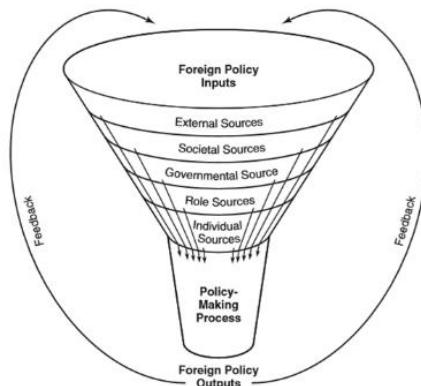
Mengapa Donald Trump sangat berambisi untuk membangun tembok perbatasan di perbatasan AS-Meksiko?

Kerangka Berpikir

1. Model the Funnel of Causalities

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, penulis menggunakan *model the Funnel of Causalities*, bagian *Individual source* dalam menganalisa permasalahan dan menjelaskan pola yang menunjukkan pada nilai dan tujuan atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menitikberatkan pada pengaruh individual dari pemimpin negara. Model ini merupakan suatu kerangka kerja yang dikemukakan pertama kali oleh ilmuwan politik James. S. Rosenau, yang menganalisa faktor-faktor yang menjelaskan perilaku negara terhadap negara lain melalui kebijakan luar negeri yang dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu; *External Sources*, *Societal Sources*, *Governmental Sources*, *Role Sources*, *Individual Sources*.

Gambar 1. 1. Funnel of Causalities Foreign Policy



Sumber: Eugene Wittkopf, *American Foreign Policy: Pattern and Procces*, 2008.

Kerangka kerja analitis ini dibentuk atas gambaran dari partisipasi dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang akan merumuskan semua faktor dalam menjelaskan tingkah laku negara dalam politik internasional yang dibagi menjadi lima bagian. Pertama, yaitu *External Sources* yang mengacu pada atribut sistem internasional dan karakteristik serta perilaku negara dan aktor non-negara yang menyusun kebijakan yang mencakup aspek-aspek lingkungan eksternal Amerika maupun tindakan apa pun yang terjadi di luar negeri yang mengkondisikan atau memengaruhi pilihan yang pembuat kebijakan (Wittkopf, Jones, & Jr, 1996, p. 19). Kedua, *Societal Sources* yaitu kategori yang menjelaskan bagaimana karakteristik sistem sosial dan politik domestik yang membentuk orientasi suatu negara terhadap dunia. Dalam cakupan ini juga menunjukkan preferensi ideologis Amerika yang berpengaruh terhadap kebijakan Amerika terhadap orang-orang di luar wilayah hukum negara. Karena kebijakan luar negeri Amerika berakar dalam pada sejarah dan budayanya, kekuatan masyarakat berpotensi kuat dalam memberikan dampak terhadap suatu kebijakan (Wittkopf, Jones, & Jr, 1996, p. 20). Ketiga, *Governmental Sources* yaitu menunjukkan bagaimana pemerintah AS yang terorganisir untuk pembuatan kebijakan luar negeri yang berpengaruh terhadap substansi kebijakan luar negeri Amerika itu sendiri bahwa variabel pemerintah mempunyai kemampuan untuk membatasi apa yang dapat dilakukan Amerika Serikat di luar negeri (Wittkopf, Jones, & Jr, 1996, pp. 20-21). Keempat, *Role Source* yang menerangkan bahwa struktur pemerintahan dan peran yang ditempati orang di dalamnya terkait erat satu sama lain. Kategori ini menggaris bawahi perilaku peran di struktur pemerintahan dipengaruhi oleh perilaku yang ditentukan secara sosial dan norma yang disetujui

secara hukum yang melekat pada posisi yang mereka tempati. Karena posisi yang mereka tempati membentuk perilaku mereka, hasil kebijakan akan cenderung dipengaruhi oleh peran yang masih ada di arena pembuatan kebijakan. Dan yang terakhir dalam framework ini ialah *Individual Sources* yang mana akan dijadikan penulis sebagai asas utama dalam tulisan ini, dimana *Individual Sources* menunjukkan bahwa hasil kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh karakteristik maupun persepsi seorang pemimpin negara dalam mengambil keputusan (Wittkopf, Jones, & Jr, 1996, pp. 21-22).

Mengingat posisi presiden sebagai pemimpin negara yang memiliki kekuasaan dan keunggulan, tidak terlalu sulit untuk memengaruhi pemikiran bahwa kebijakan luar negeri akan secara eksklusif ditentukan oleh preferensi presiden juga menggunakan hak istimewanya untuk mempersonalisasikan jalannya pemerintahan. Dilihat dari sejarah kepemimpinan dari masa ke masa, menimbulkan keyakinan bahwa individu yang menduduki jabatan penting akan membuat perbedaan dimana asumsi ini merupakan suatu premis yang terkenal secara umum sebagai dasar sistem pemilihan demokratis. Dengan adanya pergantian administrasi baru, mereka akan berusaha untuk membedakan sistemnya dari pejabat-pejabat sebelumnya dan jika terpilih lagi mereka akan terus berusaha untuk menegaskan mandat mereka. Dengan ini, kebijakan dan kepemimpinan direfleksikan sebagai suatu persamaan, dimana perubahan arah kebijakan dan hasil kebijakan sering dipandang sebagai hasil dari kecenderungan kepemimpinan (Wittkopf, Jones, & Jr, 1996, pp. 491-492).

Model *the Funnel of Causalities* kategori *Individual Sources*, mencakup nilai-nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang membedakan satu pembuat kebijakan dari pembuat kebijakan yang lain

dan serta akan membedakan pilihan kebijakan luar negerinya dari yang lain. Pertimbangan atas karakteristik individu seperti persepsi, kebutuhan pribadi, motivasi, sifat batin merupakan penentu penting atas bagaimana suatu individu bertindak, yang membuat pengaruh terhadap cara mereka menanggapi berbagai macam situasi. Pengertian dan tanggapan oleh pembuat kebijakan ditentukan tidak dengan fakta-fakta objektif namun dengan bagaimana gambaran mereka mengenai suatu situasi yang mana mereka akan bertindak sesuai dengan bagaimana dunia di pandangannya. Persepsi dipengaruhi bukan dari cerminan sederhana yang telah diamati, namun melalui nilai-nilai, memori, kebutuhan, kepercayaan yang akan membawa mereka pada pertimbangan yang mempengaruhi keputusan suatu individu dalam membuat suatu keputusan, dimana kinerja pembuat keputusan akan terbiaskan oleh persepsi individu mereka (Wittkopf, Jones, & Jr, 1996).

2. Pendekatan Psikoanalisis

Untuk menjelaskan model *Funnel of Causalities, Individual Source* secara sederhana penulis dapat menguraikannya dengan berbagai macam gagasan yang berkaitan dengan psikoanalisis, yang membahas interaksi bersinggungan diantara politik dan psikologi, atau lebih tepatnya dampak yang disebabkan oleh psikologi dalam perpolitikan (Houghton, 2009). Dalam penjelasan lain juga dapat diartikan sebagai praktik menggunakan konstruksi psikologis, seperti kepribadian, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, kebutuhan, tujuan, dan harapan, untuk menjelaskan perilaku politik dalam menganalisis hubungan yang kompleks dan timbal balik antara politik dan psikologi. Psikolog politik beranggapan bahwa tindakan politik, seperti semua bentuk perilaku manusia lainnya, adalah hasil dari pengaruh antara individu dan lingkungan (Gale, 2019). Pendekatan untuk memahami perilaku manusia

seringkali berdampingan dengan asumsi rasionalitas, yang mengasumsikan bahwa perilaku manusia dapat diatur dan dapat diprediksi (Houghton, 2009, p. 32).

Pada dasarnya *individual source* dan keterkaitan psikologis individu tersebut memunculkan asumsi dimana setiap pemimpin hadir dengan kepribadiannya masing-masing, yang mana hal ini merupakan hal yang sangat berarti penting di dalam proses pembuatan kebijakan (DMP). Ketika pemimpin dihadapi oleh situasi yang sama persis, tiap pemimpin akan merespon dengan cara yang berbeda bergantung pada kepribadian dan pengalaman di masa lalunya (McDermott, 2004). Psikoanlisis menyajikan perilaku kecondongan tertentu humanistik pada politik menunjukkan pentingnya proses psikologi individu pada *political outcomes*. Analisis ini sering digunakan dalam menganalisa konflik yang sulit diselesaikan, perang, atau sebagian besar perilaku negara atau pelaku politik kolektif lainnya di lingkungan yang kompleks. Individu tidak bertindak dalam ruang hampa begitu saja, perilaku mereka bervariasi dengan menanggapi perbedaan dalam institusi politik, budaya politik, gaya kepemimpinan, dan norma sosial. Psikologis individu dapat mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri terutama melalui interaksinya dengan aspek-aspek spesifik dari sistem internasional, pemerintah nasional, dan masyarakat (Huddy, Sears, & Levy, 2013). Hal tersebut merupakan faktor-faktor untuk memahami cara pemikiran seseorang yang memiliki *power* dalam proses pembuatan kebijakan. Jika diaplikasikan terhadap tulisan ini maka dalam kasus pembangunan tembok perbatasan, representasi dari perilaku Trump didampakkan dari pengalaman hidup juga lingkungan sosial yang membangun dan membentuk kepribadian Trump sekarang ini. Jika diamati melalui pengalaman hidupnya, Trump terlahir dari keluarga kaya raya yang sejak muda Trump juga telah dikelilingi oleh urusan

bisnis serta orang-orang sukses. Dalam perjalanan karir yang selalu menempatkannya dalam posisi *superior* contohnya sebagai bos, pemimpin, atau CEO, membuat Trump sebagai pusat utama atas bawahan-bawahannya. Serta lingkungan sosial dan keluarga yang menjadi perjalanan pembentukan karakter seorang pemimpin negara, yang berdampak besar dalam pembuatan kebijakan luar negerinya.

Karakter tidak biasa yang ditunjukkan oleh Trump merujuk pada gagasan selanjutnya guna memperdalam psikoanalisis perilaku dari Donald Trump, yaitu kepribadian *narcissistic* yang didefinisikan sebagai peningkatan perasaan mementingkan diri, kurangnya empati terhadap orang lain, dan kebutuhan besar akan pujian. Definisi utama dari *narcissistic* ialah kemegahan atau perasaan berlebihan atas kepentingan diri sendiri. Hal tersebut membuat mereka disibukkan oleh kekuatan, prestise, kesombongan, yang membuat individu berpikir bahwa merasa pantas mendapatkan perlakuan dan ketenaran khusus (Psychology Today, 2019). Konsep kepribadian narsis ini menarik perhatian khusus pada implikasi untuk psikologi politik, terutama ketika pemimpin narsis turut proses pengambilan keputusan saat menghadapi krisis, yang seringkali akan terganggu.

Pencarian atas pengakuan dan pujian yang mendorong seorang narsisistik ini muncul dari pemahaman diri yang berlebihan, ambisi mereka yang intens dan fantasi berlebih mereka. Kepastian akan kesuksesan tinggi yang dirasakan oleh mereka mengarah pada rasa hebat dan kebal, yang membuat mereka beranggapan bahwa mereka tidak pernah salah. Hal ini mendasari kapasitas seorang narsisistik untuk mengambil risiko dimana mereka bersikap seolah-olah orang-orang mengawasinya dan akan terpesona dengan mereka, serta memastikan keberhasilan dan kesejahteraannya. Hal tersebut mendorong ambisi

untuk pencarian terus menerus kekaguman dan perhatian yang membuat seorang narsistik tidak pernah terpuaskan. Selain itu, terdorongnya kebutuhan terus menerus akan kepastian, kepedulian yang konstan atas kinerja yang dilakukan, seberapa baik orang lain memikirkannya, dan tanggapan berlebihan terhadap kritik atau kekalahan, cenderung menyebabkan perasaan marah, rendah diri, malu, dan dipermalukan.

Aspek kualitas "spesial" dari individu narsis ini merupakan perasaan atas hak yang ingin mereka sampaikan. Mereka mengharapkan perlakuan khusus dari orang lain, mengharapkan orang lain melakukan apa yang mereka inginkan, dan akan marah ketika orang lain gagal memenuhi tuntutan mereka yang tidak masuk akal. Seorang narsistik cenderung mengabaikan hak dan kebutuhan orang lain untuk memenuhi keinginan dan ego diri mereka sendiri. Maka dari itu kesombongan merupakan karakteristik fitur narsisis, yang tertanam dan tumbuh dalam dirinya sendiri, dapat dilihat dari bagaimana mereka menghina, mengabaikan perasaan dan kebutuhan atau hak orang lain (Post, 1993).

Hipotesis

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan merujuk pada kerangka pemikiran di atas maka dapat diambil hipotesis bahwa ambisi Donald Trump dalam kebijakan membangun tembok perbatasan di Meksiko, dikarenakan adanya pengaruh yang sangat besar dari faktor individu Donald Trump dalam perspektifnya, yang mana salah satunya mencerminkan kepribadian *narcissitic* Donald Trump sebagai pemimpin. Penulis berasumsi bahwa kebijakan tembok perbatasan ini terdorong kuat oleh perspektif pribadi Trump yang dilakukan sebagai sarana serta simbolitas bagi dirinya untuk memenuhi ego serta kebutuhannya dalam mendapatkan perhatian, dan ingin dianggap superior, dimana rasa percaya diri

Trump dalam membuat keputusan menunjukkan keimpulsifan Trump yang dapat berpengaruh pada hubungan AS-Meksiko.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui alasan atas ambisi kebijakan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko oleh Presiden Donald Trump yang dibuat melalui Perintah Eksekutif 13767.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang tidak bergantung pada angka karena lebih menekankan pada analisis sosial atau kualitas sampel data yang dijadikan rujukan. Bersifat eksplanatif artinya karya tulis ini mencari sebab-akibat dan alasan mengapa suatu fenomena tertentu terjadi.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini, penulis menggunakan data-data yang berasal dari tulisan, laporan dari penulis yang didapatkan melalui media seperti buku, jurnal, laporan resmi yang dipublikasikan oleh lembaga resmi, sumber daya pemerintah resmi, makalah, majalah, berita, dan publikasi lain yang berhubungan dan sekaligus mendukung proses penelitian. Karya tulis ini juga akan menggunakan pernyataan, pidato, dan biografi pribadi Donald Trump untuk lebih memahami tentang dirinya dan karakteristik kepribadiannya. Kompilasi data kemudian akan dianalisis dengan maksud untuk mencari alasan di balik ambisi Donald Trump dalam membangun tembok perbatasannya.

Jangkauan Penelitian

Dalam menjaga efektivitas karya tulis ini, maka penulis memberikan batasan jangkauan penelitian agar pembahasan didalam skripsi ini tidak terlalu luas. Jangkauan penelitian ini

dimulai pada tahun Juni 2016-Februari 2020. Juni 2016 merupakan kali pertama Trump meluncurkan kampanye yang kontroversialnya terkait imigran Meksiko serta menunjukkan arah kebijakan pada tembok perbatasannya. Pada Februari 2020 merupakan data terbaru mengenai sejauh mana proses pembangunan tembok perbatasan telah dibangun.

Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, maka penulis menentukan sistematika penulisan pada karya tulis ini kedalam 5 bab, yaitu:

Bab I, membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berpikir dan aplikasinya, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penulisan.

Bab II, akan menjelaskan mengenai sejarah profil Amerika Serikat sebagai tanah migran dan dinamika kebijakan AS terhadap imigran secara umum, yang mengarah pada pergeseran tren migrasi hingga masuknya imigran Meksiko di AS dan berkembangnya imigran Meksiko di AS beserta masalah yang ditimbulkan. Dilanjutkan dengan dinamika kebijakan imigrasi AS terhadap Meksiko yang telah dibuat pada era sebelum kepemimpinan Trump.

Bab III, akan membahas tentang kebijakan AS terkait isu imigrasi yang secara khusus membahas kebijakan yang berpengaruh terhadap imigran Meksiko pada era Donald Trump, yang akan memfokuskan pada salah satu kebijakannya yaitu tembok perbatasan AS-Meksiko.

Bab IV, pemahaman lebih dalam pada latar belakang keputusan Donald Trump terhadap pembangunan tembok perbatasan di Meksiko yang dianalisis melalui faktor individu dengan pendekatan psikoanalisis.

Bab V, akan memaparkan kesimpulan dari penelitian.